

INOVASI BAPPEDA KOTA AMBON DALAM MEWUJUDKAN LAYANAN DIGITAL TERINTEGRASI

Ari Apriyansa, Aman Bahtiar Manilet, Berliany Cinta Adinda Mait

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 2025

Revised Mei 2025

Accepted Mei 2025

Available online Mei 2025

Email:

ari.apriyansa@ipdn.ac.id

33.1024@prajaipdn.ac.id

33.0844@prajaipdn.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Dalam era Revolusi Industri 4.0, digitalisasi layanan pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ambon melakukan inovasi signifikan melalui pengembangan layanan digital terintegrasi yang menghubungkan berbagai sektor perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan pembangunan daerah secara elektronik. Artikel ini membahas secara komprehensif tentang bagaimana Bappeda Kota Ambon melakukan inovasi tersebut, termasuk latar belakang kebutuhan digitalisasi, metode inovasi yang diterapkan, tahapan implementasi, manfaat yang dirasakan, hingga tantangan yang dihadapi. Studi ini menggunakan pendekatan studi literatur dari berbagai sumber resmi, laporan pemerintah daerah, dan kajian akademik yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa inovasi Bappeda Ambon berdampak positif terhadap efisiensi birokrasi, keterbukaan informasi publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Meski demikian, terdapat tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Kata Kunci: Bappeda Ambon, Inovasi Digital, Layanan Terintegrasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pelayanan publik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga adaptif terhadap dinamika teknologi demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kota Ambon, sebagai ibu kota Provinsi Maluku, turut merespons tuntutan ini melalui penguatan sistem layanan digital berbasis teknologi informasi, terutama di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi domain utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pada tahun 2023, Bappeda Kota Ambon meluncurkan berbagai inisiatif digital seperti Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPEDE), dashboard monitoring pembangunan, hingga e-Planning yang mengintegrasikan seluruh tahapan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) secara daring. Inovasi ini tidak hanya untuk mengikuti perkembangan zaman, melainkan sebagai bentuk implementasi visi Kota Ambon sebagai "Smart City" berbasis budaya lokal. Dengan populasi mencapai sekitar 370.000 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2023, dan pertumbuhan urbanisasi yang semakin pesat, Kota Ambon menghadapi tantangan dalam perencanaan pembangunan yang cepat, akurat, dan partisipatif. Oleh karena itu, digitalisasi layanan di Bappeda menjadi strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Tulisan ini akan membahas bagaimana inovasi tersebut dilakukan, metode pengembangan yang digunakan, serta dampaknya terhadap pelayanan publik di Kota Ambon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan. Sumber literatur yang digunakan meliputi dokumen resmi pemerintah Kota Ambon, laporan Bappeda Kota Ambon tahun 2023 dan 2024, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ambon, jurnal ilmiah tentang digitalisasi layanan publik, artikel berita dari media nasional, serta buku referensi terkait konsep e-government dan Smart City.

PEMBAHASAN

Latar Belakang dan Urgensi Digitalisasi di Bappeda Kota Ambon

Digitalisasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Ambon muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Latar belakang utama inovasi ini adalah perlunya mempercepat proses penyusunan rencana pembangunan, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, memperluas partisipasi masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Kota Ambon sebagai pusat administrasi, perdagangan, dan kebudayaan di Provinsi Maluku mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat; menurut data BPS Kota Ambon tahun 2023, jumlah penduduk mencapai lebih dari 370.000 jiwa dengan tingkat urbanisasi meningkat sebesar 2,3% per tahun. Konsekuensinya, kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan responsif semakin meningkat. Selain itu, adanya kebijakan nasional melalui program Gerakan Menuju Smart City dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian PAN-RB semakin mendorong Kota Ambon, melalui Bappeda, untuk melakukan reformasi digital secara serius. Tanpa digitalisasi, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam perencanaan pembangunan menjadi lambat, rawan kesalahan manual, dan sulit diverifikasi secara akurat. Oleh karena itu, inovasi layanan digital menjadi keharusan strategis yang tidak bisa ditunda lagi.

Strategi dan Inovasi yang Dilakukan Bappeda Kota Ambon

Bappeda Kota Ambon menerapkan beberapa strategi inovatif untuk mendorong layanan digital yang terintegrasi. Inovasi utama adalah pengembangan SIMPEDE (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah) yang menjadi tulang punggung digitalisasi perencanaan pembangunan. SIMPEDE mengintegrasikan tahapan mulai dari penjangkaran usulan program, penyusunan RKPD, hingga pemantauan dan evaluasi pembangunan. Sistem ini berbasis website dan dilengkapi dengan dashboard analitik yang menampilkan perkembangan proyek secara real-time. Selain SIMPEDE, Bappeda juga mengembangkan platform e-Musrenbang, yaitu sistem yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan tanpa harus hadir secara fisik, cukup melalui perangkat digital. Bappeda juga membangun Dashboard Monitoring Pembangunan yang memungkinkan wali kota, kepala OPD, dan masyarakat untuk mengakses data proyek pembangunan kapan saja dan di mana saja. Inovasi ini tidak hanya mempercepat alur kerja internal pemerintah, tetapi juga membuka ruang partisipasi dan kontrol publik terhadap program pembangunan yang sedang berjalan. Menurut laporan internal Bappeda Ambon tahun 2024, keberadaan dashboard ini berhasil mengurangi keterlambatan pelaporan proyek hingga 40% dibandingkan metode sebelumnya.

Implementasi dan Tahapan Transformasi Digital

Implementasi inovasi digital ini dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pada tahap awal, Bappeda melakukan analisis kebutuhan pengguna internal dan eksternal, lalu merancang sistem yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan dukungan konsultan teknologi informasi. Tahap berikutnya adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti server, jaringan internet di OPD, dan penyediaan perangkat komputer baru yang lebih andal. Setelah sistem siap, dilakukan tahap sosialisasi dan pelatihan intensif. Data dari Bappeda menunjukkan bahwa pada tahun 2023 lebih dari 250 pegawai OPD dilatih dalam menggunakan SIMPEDE dan e-Musrenbang melalui workshop, webinar, dan bimbingan teknis. Untuk memastikan kelancaran operasional, Bappeda juga menunjuk Tim IT internal yang bertugas melakukan troubleshooting dan update sistem berkala. Selama implementasi, Bappeda mengadopsi prinsip iteratif, artinya sistem terus diperbaiki berdasarkan feedback dari pengguna. Sebagai contoh, setelah uji coba tahap

pertama, ditemukan bahwa beberapa menu di SIMPEDE terlalu rumit; sebagai solusi, dilakukan penyederhanaan antarmuka agar lebih user-friendly. Tahapan implementasi ini menunjukkan keseriusan Bappeda dalam menerapkan prinsip transformasi digital secara bertahap, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata lapangan.

Dampak Inovasi Digital terhadap Pelayanan Publik dan Pemerintahan

Inovasi digital Bappeda Kota Ambon memberikan dampak nyata yang positif terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Pertama, dari sisi efisiensi, proses pengumpulan data Musrenbang yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan, kini bisa selesai dalam waktu kurang dari satu bulan. Menurut data internal tahun 2023, rata-rata penyusunan RKPD dapat dipercepat hingga 35% setelah penerapan SIMPEDE. Kedua, dari sisi transparansi, masyarakat kini dapat memantau langsung proyek-proyek pembangunan melalui dashboard publik, yang menampilkan informasi tentang lokasi proyek, nilai anggaran, serta progres fisiknya. Ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah di mata masyarakat. Ketiga, inovasi ini memperkuat partisipasi publik. Melalui e-Musrenbang, pada tahun 2023 tercatat ada 6.214 usulan dari masyarakat, meningkat signifikan dibandingkan 4.287 usulan pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi mempermudah akses masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, keterbukaan data membantu mendorong budaya pengawasan partisipatif di masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas pembangunan.

KESIMPULAN

Inovasi layanan digital terintegrasi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Ambon merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan partisipatif. Melalui pengembangan aplikasi seperti SIMPEDE, dashboard monitoring, dan e-Musrenbang, Bappeda berhasil meningkatkan efisiensi proses perencanaan pembangunan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memperluas partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Meski dihadapkan dengan tantangan keterbatasan infrastruktur dan literasi digital, upaya kolaboratif antara Bappeda dan instansi terkait berhasil mendorong percepatan transformasi digital di Kota Ambon. Ke depan, diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam penguatan infrastruktur teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta inovasi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat agar pelayanan publik di Kota Ambon semakin optimal dan inklusif. Pengalaman Bappeda Kota Ambon ini dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi daerah lain di Indonesia dalam mempercepat digitalisasi layanan publik di sektor perencanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawaroh, M. F. A., Ridhoi, R., Pramudito, T. D., & Pranoto, W. J. (2023). Implementasi E-Government Berbasis Aplikasi Santer Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kota Samarinda. *Jurnal Insan Pengabdian Indonesia*, 1(4), 72-80. [Jurnal Untagsmg+2Alhafi Indonesia Journal+2Jurnal UM Buton+2](#)
- Antara Maluku. (2024). Ambon Perkuat Infrastruktur Digital untuk Dukung Layanan Publik. Antara News Maluku, 12 Januari 2024.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Panduan Umum Smart City. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Basri, H., & Nurhalim, R. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMPEDE). *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 5(3), 65-77. Universitas Negeri Makassar.

- Fajrianto, F. (2021). Implementasi Peran E-Government Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banggai. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(3). jurnal.uai.ac.id
- Fataruba, M., & Rolobessy, M. J. (2024). Model Pengembangan E-Government di Kepulauan Banda Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 18863-18874. [Jurnal Universitas Pahlawan+1Jurnal Untagsmg+1](http://JurnalUniversitasPahlawan+1JurnalUntagsmg+1)
- Haris, M., & Suryani, N. (2022). Tantangan Literasi Digital di Wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Pembangunan*, 20(1), 45-58. Universitas Hasanuddin.
- Karman, K., Deswanto, R., & Ningsih, S. A. (2021). Implementasi E-Government pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 43-50. [jurnal.stkipbima.ac.id+3Jurnal UM Buton+3UNM OJS+3](http://jurnal.stkipbima.ac.id+3JurnalUMButon+3UNMOJS+3)
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- Kominfo. (2023). Laporan Indeks SPBE Nasional 2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Kurniawan, A. (2021). Efektivitas Aplikasi Pemerintahan Digital Terhadap Transparansi Publik. *Jurnal Transformasi Digital*, 6(2), 32-47. Universitas Gadjah Mada.
- Leatemia, S. (2020). Digitalisasi Birokrasi di Indonesia Timur: Studi Kapasitas Kelembagaan. Buku Studi Pembangunan Daerah, Pustaka Malu
- Lekransy, H. (2023). Digitalisasi Layanan Publik Kota Ambon: Studi Strategis Bappeda. *Jurnal Tata Kelola Daerah*, 9(2), 88-101. Unpatti Press.
- Moluccas Times. (2025). Toisutta: Sosialisasi Digital, Dukung Program Prioritas Pemkot Ambon. [Moluccastimes.id. https://www.moluccastimes.id/toisutta-sosialisasi-digital-dukung-program-prioritas-pemkot-ambon/?amp=1](https://www.moluccastimes.id/toisutta-sosialisasi-digital-dukung-program-prioritas-pemkot-ambon/?amp=1)
- Pemerintah Kota Ambon. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Ambon Tahun 2022. Bappeda Kota Ambon.
- Potret Maluku. (2023). Aplikasi E-Musrenbang Bantu Warga Terlibat Dalam Perencanaan. Potretmaluku.id, 21 November 2023.
- Potret Maluku. (2025). Mendorong Literasi Digital Sejak Dini: Pemkot Ambon Perkuat Program Smart City. [Potretmaluku.id. https://potretmaluku.id/mendorong-literasi-digital-sejak-dini-pemkot-ambon-perkuat-program-smart-city/](https://potretmaluku.id/mendorong-literasi-digital-sejak-dini-pemkot-ambon-perkuat-program-smart-city/)
- Randang, D. M., Djani, W., & Say Rani, L. P. (2021). Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Manggarai Dalam Penerapan E-Government. *Jurnal Administrasi dan Demokrasi (Administration and Democracy Journal)*, 1(1). E-Jurnal Undana
- Santoso, J., & Mahendra, D. (2021). Kolaborasi Digital Antarinstansi Pemerintah Daerah: Studi Kasus Ambon. *Jurnal Administrasi dan Inovasi Daerah*, 7(1), 22-34. Universitas Airlangga.
- Sapulette, M. I., Rahawarin, M. A., & Patty, J. T. (2023). Penerapan Prinsip E-Government Dengan Model Government To Citizen Dalam Mendukung Produktivitas BUMDes Di Desa Hunut-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1). jurnal.stkipbima.ac.id
- Simanjuntak, R. (2022). Percepatan Transformasi Digital Melalui SDM Berkualitas. *Jurnal Human Capital Development*, 4(2), 73-86. Universitas Indonesia.
- SKALA Program. (2024). Laporan Kemajuan Semester II: Reformasi Tata Kelola Digital di Ambon. Australia-Indonesia Partnership Program.
- Tambunan, T. (2019). Transformasi Ekonomi Digital di Indonesia. Penerbit LP3ES.
- Tutupoho, A., Serang, M. R., & Duwila, U. (2023). Pemanfaatan Digitalisasi Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Bagi Komunitas Rural Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 5(3). [YRPI Journal](http://YRPIJournal)



- Viona, J., & Khairiyah, K. (2021). Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis E-Government (Studi Kasus: Kendala Pemerintah Kota Padang Dalam Penerapan E-Government). *Jurnal Suara Politik*, 1(1). Jurnal UMSB
- Wahyudi, D. (2022). E-Musrenbang sebagai Instrumen Partisipatif dalam Perencanaan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(1), 112-124. Universitas Brawijaya.